

Rencana Kerja

(RENJA)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS



TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
JL. KABUPATEN NOMOR 1 TELP. (0281) 637102,626675
PURWOKERTO 53115

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja Setwan) Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 yaitu :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. **Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.**

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya unkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Sekretariat DPRD kab. Banyumas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama tahun 2021.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2019

Anggaran Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp.58.735.402.196,- (termasuk perubahan) dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 29.250.402.196,- dan belanja

langsung sebesar Rp. 29.485.000.000,- dengan 5 program dan 20 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 35.926.222.041,- (61,16%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 18.281.001.020,- (50,88%), dan belanja langsung sebesar Rp. 17.645.221.021,- (49,12%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 61,16%

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2019) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1 01	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
1 01 01	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Presentase Realisasi Fisik Program	100							
		Presentase Realisasi Keuangan	100							
1 01 01 01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan biaya untuk jasa sewa, biaya internet, telpon, listrik dan air serta belanja pajak kendaraan bermotor		12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dibayar	12							
		Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	12							
		Pembayaran pajak, PBB dan pajak kendaraan yang dibayar	1							
1 01 01 02	Pengendalian dan penatausahaan Daerah	Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang, serta lembur		12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100

					Honor pengelola keuangan daerah perangkat daerah yang dibayarkan	18							
1	01	01	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terealisasinya Penyediaan bahan habis pakai, penggandaan, surat kabar, perlengkapan kerja, dan makan minum		12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
					Alat tulis kantor yang tersedia	12							
					Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	5							
					Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	1.350							
					Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	297							
					Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2.677							
					Biaya makan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia	12							
1	01	01	04	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan	Pembayaran honor tenaga keamanan, kebersihan, pengemudi dan administrasi		12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
					Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	18							
1	01	01	05	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi	Tersedianya pembiayaan kegiatan rapat, perjalanan dinas dan bintek		12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
					Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan Tk. Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	12							

1	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur dibidang koseptual, teknis, dan fungsional								
1	01	04	01	Fasilitasi Hearing/Dialog, Konsultasi dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Penyerapan aspirasi masyarakat	100 jenis	100 jenis	100 jenis	100	100 jenis	100 jenis	100
1	01	04	02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat	Pengiriman Bintek/Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD	71 orang	71 orang	71 orang	100	71 orang	71 orang	100
1	01	04	03	Fasilitasi Fungsi Legislasi DPRD	Fasilitasi fungsi legislasi	31 Raperda	31 Raperda	31 Raperda	100	31 Raperda	31 Raperda	100
1	01	04	04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Kunjungan protokolер pimpinan dan anggota DPRD	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	20 orang	100
1	01	04	05	Fasilitasi Kesehatan General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD serta Keluarga	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarga	200 orang	200 orang	200 orang	100	200 orang	200 orang	100
1	01	04	06	Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Publikasi dan Dokumentasi kegiatan anggota DPRD	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	12 kegiatan	100
1	01	04	07	Kunja Komisi dan Studi Komparatif DPRD	Kunja Komisi dalam daerah dan luar daerah	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	100
1	01	04	08	Rapat-Rapat Paripurna	Rapat-Rapat Paripurna	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
1	01	05	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku								
				Penyusunan Konsep Produk Hukum	Penyusunan Raperda inisiatif DPRD	10 Raperda Inisiatif DPRD	10 Raperda Inisiatif DPRD	10 Raperda Inisiatif DPRD	100	10 Raperda Inisiatif DPRD	10 Raperda Inisiatif DPRD	100
				Dokumentasi Produk-produk hukum	Pencetakan buku Perda, peraturan DPRD dan keputusan DPRD	1650 bh	1650 bh	1650 bh	100	1650 bh	1650 bh	100
1	01	06	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	Prosentase Berita positif kegiatan anggota DPRD di media informasi	90							
				Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD	jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	9						
				Fasilitasi kerja pimpinan DPRD	jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD	50						

1	01	07	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat	Prosentase materi BinteK yang di aplikasikan dalam tuisi anggota dewan	100														
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat	jumlah fasilitasi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan BPJS	400														
1	01	08	Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum	Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	100														
			Penyusunan Konsep Produk Hukum	jumlah fasilitasi konsep produk hukum DPRD	24														
			Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	jumlah fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	8														
			Dokumentasi produk-produk hukum DPRD	jumlah dokumentasi produk hukum	24														
1	01	09	Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum Program Fasilitasi Aspirasi	Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat	100														
			Hearing/ dialog dan RESES	jumlah fasilitasi hearing/ dialog dan RESES	2														
1	01	10	Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD	Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat	100														
				Rapat-Rapat Dewan yang Tepat Waktu	90														
				Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	60														
			Rapat-rapat DPRD	jumlah fasilitasi rapat-rapat DPRD	98														
			Fasilitasi Fungsi DPRD	jumlah fasilitasi fungsi DPRD	60														
1	01	11	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100														
			Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5														
				Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	3														

					Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	5								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Purwokerto, 2019
 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Agus Nur Hadie, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690829 199001 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD Kab. Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun lingkup kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Persidangan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan bagian Persidangan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
- g. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- h. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - c.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - c.2. Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d.2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
- e. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - e.1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - e.2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 58.735.402.196,- terurai dalam 5 program dan 20 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2019	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan DPRD	80	100	98	125	-

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan DPRD	-	-	-	80	80	81	-	98	81	82	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

Kondisi Internal dan Eksternal OPD

LINGKUNGAN EKSTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan. 2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. 3. Kemandirian dalam rangka fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Dukungan Sarana dan Prasarana 5. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi. 6. Sinergitas hubungan yang selaras antara DPRD dan Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan 2. Adanya potensi SDM para anggota DPRD yang dapat dikembangkan 3. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD 4. Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Setwan sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan 5. Terbukanya peluang pengembangan TI dalam kajian kebijakan
Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercukupinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas. 2. Kedisiplinan pegawai yang kurang. 3. Lemahnya metode kerja yang digunakan dan sistem kearsipan 4. Intervensi anggota DPRD yang berlebihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah karena perubahan peraturan dari pemerintah pusat 2. Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung anggota DPRD dan Setwan 3. Meningkatnya kekritisian masyarakat 4. Latar Belakang anggota DPRD yang berbeda-beda

Dari tabel diatas terdapat asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan aparatur untuk meminimalisasi sikap negatif masyarakat.
2. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Kemampuan anggaran yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
4. Perkembangan TI perlu disambut positif dari anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab fasilitasi kerja Lembaga DPRD yang tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut yang perlu diperbaiki kedepannya.

Pembangunan Bidang Pelayanan Legislasi Daerah di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, anatara lain:

1. Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja
2. Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda inisiatif dewan
3. Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif
4. Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi penganggaran

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2021, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal
RKPD tahun 2019
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Banyumas	Presentase Realisasi Fisik Program	100	4.263.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Banyumas	Presentase Realisasi Fisik Program	100	4.663.000.000	
			Presentase Realisasi Keuangan	100				Presentase Realisasi Keuangan	100		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Banyumas	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dibayar	12	350.000.000	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dibayar	Banyumas	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dibayar	12	360.000.000	
			Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	12				Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	12		
			Pembayaran pajak, PBB dan pajak kendaraan yang dibayar	1				Pembayaran pajak, PBB dan pajak kendaraan yang dibayar	1		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah	Banyumas	Alat tulis kantor yang tersedia	12	728.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah	Banyumas	Alat tulis kantor yang tersedia	12	768.000.000	
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	5				Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	5		
			Jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	1.350				Jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	1.350		
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	297				Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	297		
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2.677				Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2.677		
			Biaya makan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia	12				Biaya makan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia	12		

Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah	Banyumas	Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	18	450.000.000	Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah	Banyumas	Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	18	450.000.000	
Rapat-Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah	Banyumas	Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan Tk. Provinsi/Pusat yang	12	1.060.000.000	Rapat-Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah	Banyumas	Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan Tk. Provinsi/Pusat yang	12	1.060.000.000	
		Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang	15				Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang	15		
		Kegiatan rapat koordinasi/fasilitasi pertemuan yang dilaksanakan	12				Kegiatan rapat koordinasi/fasilitasi pertemuan yang dilaksanakan	12		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	75	425.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	75	425.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyumas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam keadaan baik	24	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyumas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam keadaan baik	24	150.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah gedung dalam kondisi baik	3	500.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah gedung dalam kondisi baik	3	700.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dalam keadaan baik	12	200.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dalam keadaan	12	12 bulan	200.000.000
		Jumlah kendaraan bermotor roda 4 dalam keadaan baik	14				Jumlah kendaraan bermotor roda 4 dalam keadaan	14		
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Banyumas	Honor pengelola keuangan daerah perangkat daerah yang	18	200.000.000	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Banyumas	Honor pengelola keuangan daerah perangkat daerah yang	18	200.000.000	
Pengadaan Pakaian Dnas beserta Perlengkapannya	Banyumas	Tersedianya pakaian dinas selama 12 bulan	100	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dnas beserta Perlengkapannya	Banyumas	Tersedianya pakaian dinas selama 12 bulan	100	350.000.000	
Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	Banyumas	Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	90%	900.000.000	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	Banyumas	Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	90%	1.300.000.000	
Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Banyumas	Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	9	250.000.000	Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Banyumas	Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	9	450.000.000	
Fasilitasi Kerja Pimpinan DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD	50	650.000.000	Fasilitasi Kerja Pimpinan DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD	50	850.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat	Banyumas	Persentase materi bintek yang diaplikasikan dalam tuisi anggota dewan	100%	3.500.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Banyumas	Persentase materi bintek yang diaplikasikan dalam tuisi anggota dewan	100%	4.500.000.000	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat	Banyumas	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan BPJS	100%	3.500.000.000	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat	Banyumas	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan BPJS	100%	4.500.000.000	

Program Peningkatan Fasilitas Produk Hukum	Banyumas	Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	100%	6.850.000.000	Program Peningkatan Fasilitas Produk Hukum	Banyumas	Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	100%	9.550.000.000
Penyusunan Konsep Pruduk Hukum	Banyumas	Persentase jumlah fasilitas konsep produk hukum DPRD	24	5.500.000.000	Penyusunan Konsep Pruduk Hukum	Banyumas	Persentase jumlah fasilitas konsep produk hukum DPRD	24	8.200.000.000
Dokumentasi Produk-Produk Hukum	Banyumas	persentase jumlah dokumentasi produk hukum	24	150.000.000	Dokumentasi Produk-Produk Hukum	Banyumas	persentase jumlah dokumentasi produk hukum	24	150.000.000
Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	Banyumas	persentase jumlah fasilitas Bapemperda dan Badan Kehormatan	8	1.200.000.000	Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	Banyumas	persentase jumlah fasilitas Bapemperda dan Badan Kehormatan	8	1.200.000.000
Program Fasilitas Aspirasi	Banyumas	Persentase fasilitas pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	100%	2.000.000.000	Program Fasilitas Aspirasi	Banyumas	Persentase fasilitas pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	100%	2.400.000.000
Hearing/Dialog dan RESES	Banyumas	Jumlah fasilitas hearing/ dialog dan RESES	2	2.000.000.000	Hearing/Dialog dan RESES	Banyumas	Jumlah fasilitas hearing/ dialog dan RESES	2	2.400.000.000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	70	72.000.000	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	70	72.000.000
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	72.000.000	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	72.000.000
		Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	3				Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	3	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	5				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	5	
Program Peningkatan Fasilitas Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD	Banyumas	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu	90	5.900.000.000	Program Peningkatan Fasilitas Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD	Banyumas	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu	90	5.900.000.000
		Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	60				Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	60	
Rapat-Rapat DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitas rapat-rapat DPRD	98	900.000.000	Rapat-Rapat DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitas rapat-rapat DPRD	98	900.000.000
Fasilitasi Fungsi DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitas fungsi DPRD	60	5.000.000.000	Fasilitasi Fungsi DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitas fungsi DPRD	60	5.000.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyumas	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	
			Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	
			Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	
			Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100%	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyumas	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	
			Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra yang disusun	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen renja yang disusun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	5 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	
	Administrasi Keuangan		Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	30 Orang	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	1 Tahun	
			Jasa langganan surat kabar, telepon, internet,	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	12 Kali	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	37 Orang	
			Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 Bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	1350 Buah	
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		cetak dan penggandaan yang tersedia	2677 eksemplar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik yang tersedia	297 Buah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bahan perlengkapan kerja tersedia	5 Buah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	3 Jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3 Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	12 Bulan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	12 Keg	
			Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	12 Kali	
			Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	50 Unit	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	25 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		gedung pemerintah dalam kondisi baik	3 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	14 Unit	
			kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	24 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	24 Unit	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 kali	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Capacity building, Asdeksi, Undangan Bintek ASN/Diklat	48 orang	
	Program Layanan Dan Administrasi Keuangan		Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	100%	

	Layanan administrasi DPRD		Jumlah layanan administrasi DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	2 Layanan	
	Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlayani administrasi, ketatausahaan dan Kepegawaian	50 Orang	
	Fasilitasi rapat DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah	60 Keg	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	1 Layanan	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		Jumlah penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12 bulan	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota dan pimpinan DPRD	100 Stel	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	50 Orang	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu	80 %	
			Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	86 %	
			Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tuisi anggota dewan	100 %	
			Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	80%	
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	12 Keg	
			Jumlah produk hukum yang dihasilkan	15 Dokumen	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah penyusunan Propemperda tepat waktu	8 Dokumen	
	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah fasilitasi Produk hukum yang dihasilkan	8 Dokumen	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Kajian Perundang-Undangan yang tersusun	8 Dokumen	
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	5 Dokumen	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 Dokumen	

	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah laporan pembahasan KUA dan PPAS	1 Laporan	
	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan		Jumlah laporan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	1 Laporan	
	Pembahasan APBD		Jumlah laporan pembahasan APBD	1 Laporan	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah laporan pembahasan APBD Perubahan	1 Laporan	
	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah laporan pembahasan laporan semester	1 Laporan	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah laporan pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Laporan	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	156 Keg	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Fasilitas Komisi I	12 Keg	
			Jumlah OPD yang diawasi Komisi I	10 OPD	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah OPD yang diawasi Komisi II	7 OPD	
			Jumlah Fasilitas Komisi II	12 Keg	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah OPD yang diawasi Komisi IV	10 OPD	
			Jumlah Fasilitas Komisi IV	12 Keg	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Fasilitas Komisi III	12 Keg	
			Jumlah OPD yang diawasi Komisi III	7 OPD	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Fasilitas Komisi II dan III	6 Keg	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah fasilitas Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan BPJS	40 Orang	
	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Peserta Bimtek DPRD	300 Orang	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah pemenuhan tenaga ahli	20 Orang	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	1 laporan	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 kegiatan	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah fasilitas hearing/dialog dan RESES	3 RESES	

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 layanan	
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Fasilitasi Badan Kehormatan	4 kegiatan	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Fasilitasi Badan Kehormatan	4 kegiatan	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	1 Dokumen	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	36 Keg	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD	50 Kali	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah fasilitasi kerja pimpinan	12 kegiatan	
	Pelaksanaan Undangan DPRD		Jumlah Pelaksanaan Undangan DPRD	12 kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusiayang memiliki ptensi dan kreativitas yang tidak terbatas tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJM Tahun 2016-2021 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADILDAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan

nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional; Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan: 1. dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; 2. dalam

rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; 3. dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Banyumas . Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan ” Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas” Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A. Tugas utama : “Meningkatkan Kualitas Dan Fasilitasi Pelayanan Dalam Setiap Kegiatan DPRD Dengan program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Administrasi Umum

 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - j. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN :
- 1) Layanan Administrasi DPRD
- a. Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD
- 2) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- a. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
3. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Perda
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- a. Bimbingan Teknisi DPRD

- b. Penyusunan Program Kerja DPRD
- c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Pelaksanaan Reses
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Pelaksanaan Undangan DPRD

B. Tugas pendukung : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD Kab. Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah Pendukung Pemerintahan yang melaksanakan perencanaan DPRD di Kab. Banyumas dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013–2018. VISI Kabupaten Banyumas adalah :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

4. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

5. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

6. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan

akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Sekretariat DPRD Kab. Banyumas Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Setwan Kab. Banyumas tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2021 merupakan upaya– upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Banyumas yang ingin diwujudkan pada 2019–2023 . Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2021 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ada 6 program dan 21 kegiatan, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

- 3) Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - j. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN :
- 1) Layanan Administrasi DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD
 - 2) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
3. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Perda
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- a. Bimbingan Teknisi DPRD
 - b. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- b. Pelaksanaan Reses
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- c. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - d. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah
- b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - d. Pelaksanaan Undangan DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

II.4. RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Banyumas adalah **Program Tahunan** Sekretariat DPRD Kab. Banyumas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Banyumas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kab. Banyumas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kab. Banyumas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan				1.120.000.000	0	0	100.02	1.500.000.000	100	1.200.000.000	100.02	1.200.000.000	0	0	18.5	448.798.500	26.5	514.751.500	55	233.471.500		1.197.021.500	0	99	0	1.197.021.500	0	106.88			
	Jumlah fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	Kali	8		0	0	8		8		8		1	0	2		0	2		0	2		0	25	0	2		0	25	0	
Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD				7.900.000.000	0	0	100	8.750.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	5.64	2.563.568.450	7.04	2.482.676.514	41.5	980.823.948	41.76	936.264.492		6.963.333.404	0	99	0	6.963.333.404	0	88.14			
	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu	%	90		0	0	90		90		90		22	0	35		0	66		0	95		0	218	0	242	0	218	0	242	0
	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	%	90		0	0	60		60		60		15	0	67		0	45		0	60		0	187	0	311	0	187	0	207	0
Rapat-rapat DPRD				900.000.000	0	0	100.01	750.000.000	100	900.000.000	100.01	900.000.000	1	25.930.000	2.45	142.660.000	44.68	415.677.958	46.8	238.287.100		822.555.058	0	91	0	822.555.058	0	91.4			
	Jumlah fasilitasi rapat-rapat DPRD	Kali	98		0	0	98		98		98		20	0	35		0	35		0	29		0	29	0	29	0	29	0	29	0
Fasilitasi Fungsi DPRD				7.000.000.000	0	0	100	8.000.000.000	100	6.100.000.000	100	6.100.000.000	24.2	2.537.638.450	25.4	2.340.016.514	28.8	565.145.990	21.6	697.977.392		6.140.778.346	0	100	0	6.140.778.346	0	87.73			
	Jumlah fasilitasi fungsi DPRD	Kali	384		0	0	185		185		185		37	0	67		0	67		0	62		0	62	0	33	0	62	0	16	0
Program Fasilitasi Aspirasi				4.000.000.000	0	0	100.02	5.062.300.000	100	2.400.000.000	100.02	2.400.000.000	3	42.500.000	3.34	45.000.000	19.67	88.490.000	74	1.775.223.500		1.951.213.500	0	81	0	1.951.213.500	0	48.78			
	Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	%	80		0	0	100		100		100		0	0	0		0	50		0	100		0	150	0	150	0	150	0	187	0
Hearing/ dialog dan RESES				4.000.000.000	0	0	100.02	5.062.300.000	100	2.400.000.000	100.02	2.400.000.000	3	42.500.000	3.34	45.000.000	19.67	88.490.000	74	1.775.223.500		1.951.213.500	0	81	0	1.951.213.500	0	48.78			
	Jumlah fasilitasi hearing/ dialog dan RESES	Kali	3		0	0	2		2		2		1	0	1		0	0		0	1		0	50	0	1	0	33	0	0	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran				23.939.880.000	0	0	99.86	4.565.000.000	99.86	4.663.000.000	99.86	4.663.000.000	10.42	289.470.389	12.87	550.842.745	19.97	1.292.276.873	35.54	1.182.516.432		3.315.106.439	0	71	0	3.315.106.439	0	13.85			

		Persentase realisasi fisik program	%	100	0	0	100	100	100	25	0	50	0	50	0	87	0	212	0	212	0	212	0	212	0					
		Persentase realisasi keuangan	%	100	0	0	100	100	100	25	0	50	0	50	0	82	0	207	0	206	0	207	0	206	0					
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						2.040.000.000	0	0	100.01	300.000.000	100	360.000.000	100.01	360.000.000	15.96	0	15.96	0	16.62	64.543.942	16.56	40.851.054	105.394.996	0	29	0	105.394.996	0	5.17
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar		Bulan				0	0	12		12		12		3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	0	0
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar		Kali				0	0	12		12		12		3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	0	0
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar		Tahun				0	0	1		1		1		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	0	1	0	0	0
	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						3.803.000.000	0	0	99.98	700.000.000	99.98	768.000.000	99.98	768.000.000	16.49	69.779.400	15.82	49.483.645	15.11	236.242.402	30.84	106.557.303	462.062.750	0	60	0	462.062.750	0	12.15
	Alat Tulis Kantor yang tersedia		Bulan	12			0	0	12		12		12		3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	25	0
	bahan perlengkapan kerja tersedia		Buah	5			0	0	5		5		5		1	0	1	0	5	0	5	0	5	0	100	0	5	0	100	0
	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Buah	1350			0	0	1,350		1,350		1,350		337	0	337	0	337	0	339	0	339	0	33900	0	339	0	25	0
	alat listrik dan elektronik yang tersedia		Bulan	297			0	0	297		297		297		74	0	74	0	297	0	297	0	297	0	100	0	297	0	100	0
	cetak dan penggandaan yang tersedia		Eks	2677			0	0	2677		2677		2677		669	0	669	0	669	0	670	0	670	0	25	0	670	0	25	0

		Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	0	0	12	12	12	12	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	25	0		
	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah				2.525.000.000	0	0	100.04	450.000.000	100	450.000.000	100.04	450.000.000	4.98	57.100.000	4.98	86.100.000	4.98	86.100.000	45.06	86.950.000	316.250.000	0	70	0	316.250.000	0	12.52
		Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	1	0	0	18	18	18	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0	100	0	18	0	1800	0
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah				6.416.880.000	0	0	97.06	1.415.000.000	97.06	1.060.000.000	97.06	1.060.000.000	15.51	150.086.489	15.91	163.402.600	28.28	498.578.100	36.69	207.692.400	1.019.759.589	0	96	0	1.019.759.589	0	15.89
		Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan		0	0	12	12	12	12	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	0	0
		Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Bulan	100	0	0	15	15	15	15	3	0	4	0	3	0	6	0	6	0	6	0	40	0	6	0	6	0
		Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	1	0	0	12	12	12	12	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	300	0
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				2.225.000.000	0	0	99.99	200.000.000	99.99	425.000.000	99.99	425.000.000	7.78	0	14.31	56.600.000	33.33	5.800.000	33.34	142.890.000	205.290.000	0	48	0	205.290.000	0	9.23

		peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	1	0	0	75	75	75	18	0	18	0	18	0	21	0	21	0	28	0	21	0	2100	0			
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah				1.200.000.000	0	0	100.04	200.000.000	100	200.000.000	100.04	200.000.000	3.99	6.400.000	7.83	34.200.000	8.17	36.000.000	60.01	79.525.000	156.125.000	0	78	0	156.125.000	0	13.01
		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	1	0	0	12	12	12	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25	0	3	0	300	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah				2.500.000.000	0	0	100.01	700.000.000	100	700.000.000	100.01	700.000.000	0.98	6.104.500	18.62	161.056.500	18.43	126.062.560	45.32	263.480.000	556.703.560	0	79	0	556.703.560	0	22.27
		gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	1	0	0	3	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	100	0	3	0	300	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah				1.160.000.000	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	14.57	0	14.25	0	36.31	37.910.369	34.87	82.946.775	120.857.144	0	60	0	120.857.144	0	10.42
		kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	100	0	0	12	12	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	100	0	12	0	12	0	
		kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit		0	0	14	14	14	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	100	0	14	0	0	0	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				870.000.000	0	0	100	200.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	5.86	0	3.74	0	10.27	44.289.500	30.16	36.623.900	80.913.400	0	53	0	80.913.400	0	9.3
		peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	1	0	0	24	24	24	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	100	0	24	0	2400	0	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya				1.200.000.000	0	0	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	0	0	0	0	40	156.750.000	40	135.000.000	291.750.000	0	83	0	291.750.000	0	24.31		
	pakaian dinas yang tersedia	Set	210		0	0	100	100	100	100	25	0	50	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	11	0			
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				1.286.140.000	0	0	100	350.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	16	7.000.000	24	10.500.000	24	10.500.000	32	12.100.000	40.100.000	0	55	0	40.100.000	0	3.12		
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100		0	0	100	100	100	100	25	0	50	0	50	0	50	0	100	0	225	0	225	0	225	0	225	0		
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		0	0	100	100	100	100	25	0	50	0	50	0	50	0	100	0	225	0	225	0	225	0	225	0		
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.286.140.000	0	0	100	350.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	16	7.000.000	24	10.500.000	24	10.500.000	32	12.100.000	40.100.000	0	55	0	40.100.000	0	3.12		
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	1		0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0	400	0	20	0	2000	0
	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Kali	50		0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	400	0	12	0	24	0
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Dok	5		0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0	400	0	20	0	400	0

MATRIK RENJA VERSI 13 TAHUN 2006
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	Urusan/ Bidang	NO	Program	Indikator Program	NO	Kegiatan	Indikator Kegiatan	NO	Sub kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Sumber Dana			
											APBD Kab	APBD Prov	APBN	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah = 100% 2. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah = 100% 3. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan = 100% 4. Persentase realisasi	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun = 5Dokumen 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun = 5Dokumen	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renja yang disusun = 1 Dokumen 2. Jumlah dokumen renstra yang disusun = 1 Dokumen	50000000	0	0	50000000
								2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD = 5 Dokumen	100000000	0	0	100000000
								3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan = 3 Kali	100000000	0	0	100000000

		yang di aplikasikan dalam tuisi anggota dewan = % Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti = % Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu = %	DPRD	kesejahteraan DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu = 1Layanan	26	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota dan pimpinan DPRD = 100 Stel	200000000	0	0	200000000
					27	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up = 50 Orang	150000000	0	0	150000000
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	1. Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu = 86%2. Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah = 86%3. Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi = 80%4. Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum = %5. Persentase materi bintak	7	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan Propemperda tepat waktu = 8 Dokumen	1000000000	0	0	1000000000
					29	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah fasilitasi Produk hukum yang dihasilkan = 8 Dokumen	2000000000	0	0	2000000000
					30	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian Perundang-Undangan yang tersusun = 8 Dokumen	2000000000	0	0	2000000000
					31	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun = 5 Dokumen	300000000	0	0	300000000
					32	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun = 1 Dokumen	500000000	0	0	500000000
			8	Pembahasan Kebijakan Anggaran	33	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan pembahasan KUA dan PPAS = 1 Laporan	250000000	0	0	250000000
					34	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah laporan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan = 1 Laporan	250000000	0	0	250000000

				35	Pembahasan APBD	Jumlah laporan pembahasan APBD = 1 Laporan	250000000	0	0	250000000
				36	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah laporan pembahasan APBD Perubahan = 1 Laporan	250000000	0	0	250000000
				37	Pembahasan Laporan Semester		150000000	0	0	150000000
				38	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1000000000	0	0	1000000000
	9	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan = 156Keg	39	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	1. Jumlah Fasilitasi Komisi I = 12 Keg2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi I = 10 OPD	900000000	0	0	900000000
				40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1. Jumlah Fasilitasi Komisi II = 12 Keg2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi II = 7 OPD	600000000	0	0	600000000
				41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1. Jumlah Fasilitasi Komisi IV = 12 Keg2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi IV = 10 OPD	900000000	0	0	900000000
				42	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1. Jumlah Fasilitasi Komisi III = 12 Keg2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi III = 7 OPD	600000000	0	0	600000000

materi untuk yang di aplikasikan dalam tuisi anggota dewan = 100%6. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti = %7. Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda = %8. Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu = 80%9. Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu = %

					43	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitas Komisi II dan III = 6 Keg	600000000	0	0	600000000		
				10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah fasilitas Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan	44	Bimbingan Teknisi DPRD	Jumlah Peserta Bimtek DPRD = 300 Orang	3771500000	0	0	3771500000
							45	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah pemenuhan tenaga ahli = 20 Orang	520000000	0	0	520000000
							46	Penyusunan Program Kerja DPRD		500000000	0	0	500000000
				11	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Hearing dan Reses DPRD = 15Keg	47	Pelaksanaan Reses		3000000000	0	0	3000000000
				12	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah Fasilitas Badan Kebermatan	48	Etik DPRD		2500000000	0	0	2500000000
							49	Pengawasan Kode Etik DPRD		2500000000	0	0	2500000000
				13	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi = 36Keg	50	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD = 36 Keg	2500000000	0	0	2500000000
				14	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD = 50Kali	51	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		5000000000	0	0	5000000000
							52	Pelaksanaan Undang-undang DPRD	Jumlah Pelaksanaan Undang-undang DPRD = 12 Kali	2000000000	0	0	2000000000
2		4		15			53	TOTAL		6.1147E+10	0	0	61146908000

Marik Renja Versi Permendagri 2019
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
SEKRETARIAT DPRD
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Tahun 2022		Catatan Penting	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
						APBD Kab	APBD Prov	APBN				Total
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD					61,146,908,000	0	0	61,146,908,000		70,306,708,000	
4.02.0.00.0.00.01.01	SEKRETARIAT DPRD					61,146,908,000	0	0	61,146,908,000		70,306,708,000	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					61,146,908,000	0	0	61,146,908,000		70,306,708,000	
4 02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					61,146,908,000	0	0	61,146,908,000		70,306,708,000	
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan2. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan3. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah4. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah			1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 %	8,473,000,000	0	0	8,473,000,000	1. % 2. % 3. % 4. %	9,395,300,000	
4 02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun2. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			1. 5 Dokumen 2. 5 Dokumen	250,000,000	0	0	250,000,000	1. 5 Dokumen 2. Dokumen	275,000,000	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renstra yang disusun2. Jumlah dokumen renja yang disusun	BMS		1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen	50,000,000	0	0	50,000,000	1. Dokumen 2. Dokumen	55,000,000	
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	BMS		5 Dokumen	100,000,000	0	0	100,000,000	5 Dokumen	110,000,000	

4	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	BMS	3 Kali	100,000,000	0	0	100,000,000	3 Kali	110,000,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	BMS	12 Bulan	4,800,000,000	0	0	4,800,000,000	12 Bulan	5,300,000,000
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	BMS	30 Orang	4,800,000,000	0	0	4,800,000,000	30 Orang	5,300,000,000
4	02	01	2.03		Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	BMS	12 Bulan	3,223,000,000	0	0	3,223,000,000	12 Bulan	3,600,300,000
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar 2. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	BMS	1. 1 Tahun 2. 12 Bulan	240,000,000	0	0	240,000,000	1. 1 Tahun 2. 12 Bulan	264,000,000
4	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	BMS	12 Kali	105,000,000	0	0	105,000,000	12 Kali	115,500,000
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya 2. Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	BMS	1. 37 Orang 2. 12 Bulan	888,000,000	0	0	888,000,000	1. 20 Orang 2. 12 Bulan	976,800,000
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia 2. Alat Tulis Kantor yang tersedia	BMS	1. 1350 Buah 2. 12 Bulan	80,000,000	0	0	80,000,000	1. 1,350 Buah 2. 12 Bulan	88,000,000
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia	BMS	2677 eksemplar	200,000,000	0	0	200,000,000	2677 eksemplar	220,000,000
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia	BMS	297 Buah	10,000,000	0	0	10,000,000	297 Buah	11,000,000
4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia	BMS	5 Buah	250,000,000	0	0	250,000,000	5 Buah	275,000,000
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	BMS	3 Jenis	20,000,000	0	0	20,000,000	Jenis	22,000,000
4	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	BMS	3 Jenis	200,000,000	0	0	200,000,000	Jenis	275,000,000
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	BMS	12 Bulan	300,000,000	0	0	300,000,000	12 Bulan	330,000,000

4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan2. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	BMS	1. 12 Keg 2. 12 Kali 3. 12 Bulan	250,000,000	0	0	250,000,000	1. 15 Keg 2. 12 Kali 3. 12 Bulan	275,000,000	
4	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	BMS	50 Unit	50,000,000	0	0	50,000,000	75 Unit	55,000,000	
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	BMS	25 Unit	220,000,000	0	0	220,000,000	75 Unit	242,000,000	
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintah dalam kondisi baik	BMS	3 Unit	100,000,000	0	0	100,000,000	3 Unit	110,000,000	
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	BMS	1. 14 Unit 2. 12 Unit	150,000,000	0	0	150,000,000	1. 14 Unit 2. 12 Unit	165,000,000	
4	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	BMS	24 Unit	50,000,000	0	0	50,000,000	24 Unit	55,000,000	
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	BMS	24 Unit	110,000,000	0	0	110,000,000	24 Unit	121,000,000	
4	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BMS		200,000,000	0	0	200,000,000		220,000,000	
4	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		BMS		200,000,000	0	0	200,000,000		220,000,000	
4	02	02			Program Layanan Dan Administrasi Keuangan	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	BMS	100%	32,782,408,000	0	0	32,782,408,000	100%	38,534,408,000	
4	02	02	2.01		Layanan administrasi DPRD	Jumlah layanan administrasi DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	BMS	2 Layanan	1,505,000,000	0	0	1,505,000,000	2Layanan	7,150,000,000	
4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlayani administrasi, ketatausahaan dan Kepegawaian	BMS	50 Orang	5,000,000	0	0	5,000,000	50 Orang	5,500,000,000	
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi rapat DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah	BMS	60 Keg	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	122 Keg	1,650,000,000	

4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi dan tepat waktu	BMS	1 Layanan	31,277,408,000	0	0	31,277,408,000	1Layanan	31,384,408,000
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		BMS		30,927,408,000	0	0	30,927,408,000		30,999,408,000
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota dan pimpinan DPRD	BMS	100 Stel	200,000,000	0	0	200,000,000	100 Stel	220,000,000
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	BMS	50 Orang	150,000,000	0	0	150,000,000	50 Orang	165,000,000
4	02	03			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	1. Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu2. Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu3. Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan4. Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	BMS	1. 80 % 2. 86 % 3. 100 % 4. 80 %	19,891,500,000	0	0	19,891,500,000	1. 80 % 2. 86 % 3. 100 % 4. 80 %	22,377,000,000
4	02	03	2.01		Pembentukan Perdan dan Peraturan DPRD	1. Jumlah fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD2. Jumlah produk hukum yang dihasilkan	BMS	1. 12 Keg 2. 15 Dokumen	5,350,000,000	0	0	5,350,000,000	1. Keg 2. 15 Dokumen	5,885,000,000
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan Propemperda tepat waktu	BMS	8 Dokumen	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	8 Dokumen	1,100,000,000
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah fasilitasi Produk hukum yang dihasilkan	BMS	8 Dokumen	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	9 Dokumen	2,200,000,000
4	02	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan yang tersusun	BMS	8 Dokumen	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	8 Dokumen	2,200,000,000
4	02	03	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	BMS	5 Dokumen	300,000,000	0	0	300,000,000	5 Dokumen	330,000,000
4	02	03	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	BMS	1 Dokumen	50,000,000	0	0	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	BMS	6 Dokumen	2,150,000,000	0	0	2,150,000,000	6 Dokumen	2,365,000,000
4	02	03	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan pembahasan KUA dan PPAS	BMS	1 Laporan	250,000,000	0	0	250,000,000	1 Laporan	275,000,000
4	02	03	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah laporan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	BMS	1 Laporan	250,000,000	0	0	250,000,000	1 Laporan	275,000,000
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah laporan pembahasan APBD	BMS	1 Laporan	250,000,000	0	0	250,000,000	1 Laporan	275,000,000
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah laporan pembahasan APBD Perubahan	BMS	1 Laporan	250,000,000	0	0	250,000,000	1 Laporan	275,000,000

4	02	03	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester		BMS	1 Laporan	150,000,000	0	0	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		BMS	1 Laporan	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1 Laporan	1,100,000,000	
4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	BMS	156 Keg	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	156 Keg	3,960,000,000	
4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1. Jumlah Fasilitas Komisi I2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi I	BMS	1. 12 Keg 2. 10 OPD	900,000,000	0	0	900,000,000	1. Keg 2. OPD	990,000,000	
4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1. Jumlah OPD yang diawasi Komisi II2. Jumlah Fasilitas Komisi II	BMS	1. 7 OPD 2. 12 Keg	600,000,000	0	0	600,000,000	1. OPD 2. Keg	660,000,000	
4	02	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1. Jumlah OPD yang diawasi Komisi IV2. Jumlah Fasilitas Komisi IV	BMS	1. 10 OPD 2. 12 Keg	900,000,000	0	0	900,000,000	1. OPD 2. Keg	990,000,000	
4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1. Jumlah Fasilitas Komisi III2. Jumlah OPD yang diawasi Komisi III	BMS	1. 12 Keg 2. 7 OPD	600,000,000	0	0	600,000,000	1. Keg2. OPD	660,000,000	
4	02	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitas Komisi II dan III	BMS	6 Keg	600,000,000	0	0	600,000,000	6 Keg	660,000,000	
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah fasilitas peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, FLHKPN, dan BPJS	BMS	40 Orang	4,341,500,000	0	0	4,341,500,000	400 Orang	5,272,000,000	
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimtek DPRD	BMS	300 Orang	3,771,500,000	0	0	3,771,500,000	300Orang	4,150,000,000	
4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah pemenuhan tenaga ahli	BMS	20 Orang	520,000,000	0	0	520,000,000	9 Orang	572,000,000	
4	02	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		BMS		50,000,000	0	0	50,000,000		550,000,000	
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		BMS		3,000,000,000	0	0	3,000,000,000		3,300,000,000	
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses		BMS		3,000,000,000	0	0	3,000,000,000		3,300,000,000	
4	02	03	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		BMS		500,000,000	0	0	500,000,000		550,000,000	
4	02	03	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		BMS		250,000,000	0	0	250,000,000		275,000,000	
4	02	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		BMS		250,000,000	0	0	250,000,000		275,000,000	

4	02	03	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi		BMS	1 Dokumen	250,000,000	0	0	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	
4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD		BMS	36 Keg	250,000,000	0	0	250,000,000	3 Keg	275,000,000	
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD		BMS	50 Kali	700,000,000	0	0	700,000,000	50 Kali	770,000,000	
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			BMS		500,000,000	0	0	500,000,000		550,000,000	
4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Undangan DPRD		BMS	12 Kali	200,000,000	0	0	200,000,000	12 Kali	220,000,000	
TOTAL PAGU										61,146,908,000			61,146,908,000		70,306,708,000	